

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN PLURAL DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM PADA MADRASAH ALIYAH

THE IMPLEMENTATION OF PLURAL EDUCATION CURRICULUM AT ISLAMIC HIGH SCHOOL

Muh.Harta

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jl. HM.Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Kabupaten Gowa
Email: muhammadharta1956@gmail.com

Naskah diterima tanggal 30 September 2016. Naskah direvisi tanggal 28 Oktober 2016. Naskah disetujui tanggal 9 November 2016.

Abstrak

Materi pendidikan agama Islam pada madrasah dewasa ini pada umumnya belum menghidupkan pendidikan pluralitas yang baik, Akibatnya konflik sosial masih sering mewarnai kehidupan masyarakat majemuk (plural). Konflik internal umat Islam sendiri masih sering terjadi sebagai implikasi dari fanatisme sektarian karena beda budaya, aliran teologi atau mazhab fikih yang akhirnya membuahkan kekerasan, dehumanisasi dan radikalisme yang merusak citra Islam sebagai agama damai dan rahmat bagi semesta alam. Penelitian ini bertujuan, mengetahui eksistensi pendidikan pluralitas dalam kurikulum Pendidikan Islam pada Madrasah Aliyah, mengelaborasi implementasi materi pendidikan pluralitas dalam kurikulum pendidikan Islam di Madrasah Aliyah, sehingga diperoleh solusi untuk memecahkan berbagai tantangan yang dihadapi materi pelajaran Pendidikan Agama Islam di Indonesia. Metode penelitian *library research*, menggunakan pendekatan sosio-kultural, pendekatan teologi normatif, dan pendekatan filosofis. Hasil penelitian menemukan bahwa eksistensi pendidikan pluralitas sejak era reformasi dan globalisasi sudah mendapat momentum untuk dikembangkan dan pada saatnya disosialisasikan nilai-nilainya serta diaplikasikan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kurikulum pendidikan Islam pada Madrasah Aliyah. Aplikasi materi pelajaran pendidikan agama Islam selama ini lebih berorientasi pada peningkatan kesalehan pribadi, sedangkan orientasi kekinian seperti kesadaran menghargai pluralitas, Hak Azasi Manusia (HAM), nasionalisme, inklusivisme, dan lain sebagainya masih kurang mendapat perhatian. Kurikulum Pendidikan Islam dapat dikembangkan dengan menerapkan nilai-nilai pendidikan pluralitas di dalamnya pada mata pelajaran Alquran dan hadis, fikih, akidah-akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam.

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam, pluralisme, kurikulum, Madrasah Aliyah.

Abstract

Islamic religious education in madrasas in general not a good turn plurality education, social conflicts result is often color the life of a plural society (plurality). Internal conflicts Muslims themselves are still common as the implications of sectarian fanaticism because different cultures, schools of theology or Islamic school of thought that led to the violence and dehumanization that damage the image of Islam as a religion of peace and mercy to the worlds. This study aims, know the existence of a plurality education in the curriculum of Islamic education in Madrasah Aliyah, elaborating implementation plurality educational material in the curriculum of Islamic education in Madrasah Aliyah, in order to obtain a solution to solve the challenges facing the educational subject matter of Islam in Indonesia. The research method library research, socio-cultural approach, normative theological approach and philosophical approach. The study found that the existence of a plurality education since the era of reform and globalization has been gaining momentum in time to be developed and disseminated its values and applied in education, especially in the Islamic education curriculum in Madrasah Aliyah. Applications subject matter of Islamic religious education has been more oriented to the improvement of personal piety, whereas the present orientation as awareness for the respect of plurality, human rights (HAM), nationalism, inclusiveness, and others still received less attention. Islamic education curriculum can be developed by applying a plurality of educational values in them on the subjects of the Koran and the Hadith, jurisprudence, theology-morals, and cultural history of Islam.

Keywords: Islamic Education, pluralism, curriculum, Madrasah Aliyah.

PENDAHULUAN

Upaya untuk mencari dan menemukan paradigma baru pendidikan Islam tidak akan pernah berhenti walau zaman telah berganti, terus menerus dilakukan penyempurnaan seiring dengan perubahan, perkembangan dan dinamika masyarakat. Pemikiran untuk mencari paradigma baru pendidikan Islam tidaklah bersifat reaktif dan defensif yang hanya menjawab dan membela kebenaran setelah problema muncul di permukaan. Upaya itu, selain harus mampu membuat dan merumuskan konsep yang dapat dioperasionalkan, juga harus mengandung nilai dasar yang bersifat universal, strategis, proaktif dan antisipatif, serta adaptatif terhadap berbagai kebutuhan dan perkembangan masyarakat, bahkan harus mendahului perkembangan masalah yang akan muncul pada masa yang akan datang. Selain itu juga harus mampu mempertahankan nilai dasar yang paling benar dan diyakini eksistensinya kebenarannya (Mastuhu, 1999: 3).

Untuk menemukan paradigma baru tentang pendidikan Islam, agar mampu memberi respon terhadap berbagai problema dan tantangan di lautan zaman era globalisasi ini (Tilaar, 1997: 20-21) sangat diperlukan evaluasi dengan melihat faktor yang bersifat internal dan eksternal. Secara internal, dunia pendidikan Islam di Indonesia masih diperhadapkan berbagai problema yang tidak ringan dan gampang diselesaikan secara instan, tetapi memerlukan kajian, studi dan pemikiran yang lebih komprehensif, serta multi-dimensi (Ihsan, 1997: 13). Komponen pendidikan tersebut meliputi: visi, misi, tujuan pendidikan, kurikulum, kompetensi profesionalisme guru, metodologi pembelajaran, kompetensi lulusan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, evaluasi, dan termasuk peserta didik dan lingkungan pendidikan yang saling terkait (Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan).

Pengimplementasian sikap pluralisme dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah, kompetensi dan profesionalis guru menjadi sangat penting. Berdasarkan latar belakang pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana eksistensi pendidikan pluralitas dalam kurikulum Pendidikan Islam pada Madrasah Aliyah? sehingga peserta didik dapat mengembangkan sikap menghargai nilai kemanusiaan, menerima perbedaan dan kesamaan.

Tinjauan Pustaka

Kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pendidikan. Mata pelajaran tersebut sudah disiapkan dan dirumuskan berdasarkan perencanaan yang sistematis dan koordinatif dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan (Nata, 1997: 123). Dengan demikian Kurikulum Pendidikan Islam dapat diartikan dengan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Sementara itu, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Aliyah yaitu sejumlah nama mata pelajaran seperti Alquran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Jadi, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam kurikulum pendidikan Islam yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sejumlah mata pelajaran yang diajarkan guru kepada peserta didik pada jenjang pendidikan formal (Madrasah Aliyah) dan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan peserta didik, yaitu mata pelajaran Alquran-Hadis, Akidah-Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa konsep dasar dan pengembangan materi sejumlah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah yang mengarah kepada pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman atau pluralitas. Nilai-nilai pluralisme mencakup kasih sayang, cinta, tolong-menolong, toleransi, tenggang rasa, kebajikan, menghormati pendapat, dan sikap-sikap kemanusiaan yang mulia lainnya (Fanani, 2004: 13).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini *library research* (Bogdan & Steven J. Taylor, 1992: 12; Nazir, 1998: 58) yang berbentuk deskriptif dengan analisis penelitian kualitatif yang bercorak rasionalistik. Berbagai pendekatan yang digunakan di antaranya: 1) pendekatan sosio-kultural, yakni melihat keragaman masyarakat dalam segi budaya, kepercayaan, upacara keagamaan, dan aliran teologis dalam perspektif Islam. 2) pendekatan teologi normatif, yaitu suatu bentuk tinjauan positif atas variabel perspektif ketentuan agama, seperti ayat Alquran dan hadis, terutama ayat yang berkenaan dengan pendidikan dan pluralitas. 3) pendekatan filosofis, sebagai metode analisis kritis, mendalam dan sistematis mengkaji suatu konsep, paham keyakinan dan ide pemikiran serta nilai-nilai substansial.

PEMBAHASAN

Eksistensi Pendidikan Pluralitas dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Aliyah

Pendidikan agama yang diberikan di sekolah atau madrasah pada umumnya juga belum menghidupkan pendidikan pluralitas yang baik, bahkan cenderung berlawanan. Akibatnya, konflik sosial sering kali diperkeras oleh adanya legitimasi keagamaan yang diajarkan dalam pendidikan agama di sekolah atau madrasah daerah yang rawan konflik. Hal ini membuat konflik mempunyai akar dalam keyakinan keagamaan yang fundamental sehingga konflik sosial kekerasan semakin sulit diatasi, karena dipahami sebagai bagian dari panggilan agamanya. Keragaman pada awalnya memang tidak menimbulkan persoalan atau gejolak sosial. Akan tetapi, dikarenakan motif ekonomi, politik, dan sosial manusia yang sering dibarengi dengan keinginan untuk menguasai, meminjam istilah Nietzsche –*will to power*– sering menjadikan mereka menghalalkan segala cara. Penghalalan segala cara adalah naluri hewani manusia yang muncul di permukaan. Padahal, ada sebuah nilai keluhuran manusia berupa akal sehat dan hati nurani yang harus dipertimbangkan ketika melakukan sebuah tindakan (Fanani, 2004: 6).

Realitas menunjukkan bahwa kurikulum Pendidikan Agama Islam jauh dari apa yang diharapkan dari pendidikan yaitu memperhatikan perkembangan akal sehat, jasmani, hati dan rohani peserta didik. Demikian juga, pendidikan yang dipraktikkan lebih bercorak eksklusif, yaitu seakan-akan hanya agamanya sendiri yang benar, mazhab atau aliran teologinya saja bisa diterima dan mempunyai hak hidup, sementara agama yang lain salah, mazhab dan aliran pemikiran orang lain harus ditolak, tersesat dan terancam hak hidupnya, baik di kalangan mayoritas maupun minoritas. Padahal, nilai keluhuran dan kemanusiaan yang lahir dari pendidikan terwujud ketika diperhadapkan dengan realitas pluralitas, yaitu sebuah sikap yang menghargai perbedaan disertai dengan kearifan menerima dan mengakui kebenaran yang ada pada orang lain. Sebuah sikap pluralis dalam beragama sebuah keniscayaan yang mesti dilakukan dalam kehidupan sehari-hari (<https://www.scribd.com>).

Salah satu aspek penting untuk mengembangkan keberagaman yang inklusif dan pluralis sebenarnya adalah pendidikan. Sayangnya, aspek pendidikan pluralitas selama ini

kurang tersentuh, karena hanya dipandang sebagai persoalan pinggiran yang tidak signifikan. Padahal pendidikan dalam pengertian umum sebagai basis atau dasar untuk menciptakan SDM dan pembentukan karakter suatu bangsa. Pendidikan sebagaimana ditegaskan Ahmad Syafi'i Ma'arif, sesungguhnya juga wahana paling efektif untuk internalisasi nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan inklusivisme.

Pendidikan di Indonesia selama orde baru, hanya sebagai proses pemenuhan kewajiban yang cenderung bersifat proyek instan, sehingga yang terjadi hanya sekedar pembentukan manusia yang siap kerja dan menjadi pegawai. Era orde baru, pendidikan hanya disamakan dengan pengajaran; aspek pembentukan sikap, kepribadian, mental, dan kreativitas jauh dari jangkauan pendidikan. Hasil pendidikan model orde baru tidak mengajarkan atau bahkan menjauhi sikap keberagaman yang pluralis-inklusif. Ketika itu yang diajarkan justru menumbuhkan sikap kebenaran dan pembelaan pada agamanya sendiri (Fanani, 2004:11).

Menyimak pendidikan agama Islam di Indonesia. Materi pembelajaran memang lebih ditekankan pada persoalan teologis-normatif yang banyak dijumpai dalam mata pelajaran fikih, Alquran dan hadis, akhlak, dan mata pelajaran lainnya. Sedangkan orientasi kekinian kurang mendapat respon, seperti demokratisasi, hak asasi manusia, budaya kerja, menerima peradaban, menghargai pluralitas, dan sebagainya. Di samping itu, menjadi pertanyaan melihat pengaplikasian nilai-nilai agama yang masih rendah di kalangan peserta didik yang kemudian menjadi bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat. Setidaknya, masih banyak kelemahan dalam mengeksekusi kurikulum tersebut khususnya dalam isi kurikulum pendidikan agama Islam. Konsep tentang pluralitas masih sangat kurang bahkan hampir tidak ada. Kurikulum agama hanya berisikan materi ibadah ubudiyah atau praktek-praktek keagamaan lainnya yang mengatur manusia dalam hubungan dengan Tuhannya (*ablun min Allah*), sehingga materi tentang hubungan mereka dengan sesama manusia (*ablun min al-nas*), khususnya dengan yang berbeda keyakinan (perbedaan mazhab, teologi, dan sebagainya) menjadi kurang (Salim, 2012: 441).

Materi pelajaran agama di bangku sekolah atau madrasah tentang ide kemajemukan dan kerukunan memang masih sangat minim. Pelajaran seperti ini malah lebih banyak ditemukan di mata pelajaran sejarah, pendidikan kewarganegaraan,

maupun geografi, bahwa bangsa ini terdiri dari berbagai jenis suku, ras, bahasa, dan agama adalah sebuah kenyataan sosial yang tidak bisa terbantahkan. Agama sendiri menjadi pilar dasar kebangsaan Indonesia. Meskipun dalam sebuah negara demokrasi presidensial, akan tetapi nafas agama senantiasa tidak bisa dihilangkan. Dalam sila pertama Pancasila menunjukkan peran agama dalam konstitusi negara, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini tidak bisa dipisahkan dari sebuah fakta sosial bahwa di Indonesia sendiri maupun sistem kepercayaan yang hadir dari luar.

Dalam sejarah pendidikan pluralitas sebagai sebuah konsep atau pemikiran tidak muncul dalam ruangan yang kosong, namun ada interes politik, sosial, ekonomi, dan intelektual yang mendorong kemunculannya. Wacana pendidikan pluralitas pada awalnya sangat dekat dengan negara adidaya yaitu Amerika Serikat, karena pendidikan pluralitas memiliki akar sejarah dengan gerakan Hak Asasi Manusia (HAM) dari berbagai kelompok yang tertindas di negeri tersebut. Banyak uraian sejarah ataupun asal-usul pendidikan pluralitas yang merujuk pada gerakan sosial orang Amerika keturunan Afrika dan kelompok kulit warna lain yang mengalami praktek diskriminasi di lembaga-lembaga publik. Di antara lembaga-lembaga tersebut adalah lembaga pendidikan. Sekitar tahun 1960-an sampai 1970-an, suara-suara yang menuntut agar lembaga pendidikan lebih konsisten dalam menerima dan menghargai perbedaan semakin kencang. Mereka menuntut adanya persamaan kesempatan di bidang pekerjaan dan pendidikan. Momentum inilah yang dianggap sebagai awal mula dari konseptualisasi pendidikan pluralitas (Suardi, 2015: 194).

Konsep pendidikan pluralitas dalam perjalanannya mulai melebarkan sayapnya, ketika kelompok kawasan yang secara khusus memiliki keragaman etnis, ras, agama, dan budaya seperti halnya Indonesia. Sekarang ini, pendidikan pluralitas secara umum mencakup ide pluralisme budaya. Tema umum yang dibahas meliputi pemahaman budaya, penghargaan budaya dari kelompok yang beragam dan persiapan untuk hidup dalam masyarakat pluralistik. Dalam konteks ke-Indonesiaan, pendidikan pluralitas mendapat apresiasi dari berbagai kalangan seiring dengan keruntuhan rezim Soeharto. Ihwal pluralisme dan multikulturalisme sudah saatnya dikampanyekan dan tidak hanya berhenti pada tataran wacana dan sering menjadi komoditas politik, melainkan

lebih dari itu, nilai-nilai pluralisme seharusnya dilanjutkan pada pembebasan (liberasi) terhadap segala bentuk kezaliman, ketidakadilan, *status quo*, dan politisasi rakyat kecil yang perlu segera disusun menjadi agenda aksi nyata dan membebaskan pada jenjang pendidikan termasuk di Madrasah Aliyah (<https://sharingkuliahku.wordpress.com>.)

Melihat hal tersebut, kebutuhan akan sebuah kurikulum pembelajaran agama Islam yang menekankan pada ide-ide pluralitas sudah sangat dibutuhkan. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia harus dapat melihat agama-agama yang lain dalam kacamata toleransi, kerukunan, dan persamaan. Ide tentang universalitas, dialog antar agama, bahaya diskriminasi, *ethno cultural*, dan agama sudah harus mulai diperkenalkan kepada para peserta didik pada bangku sekolah atau madrasah sehingga pada akhirnya membekali mereka sebuah perspektif baru dalam menanggapi sebuah perbedaan dalam berkeyakinan.

Selain itu, pendidikan agama Islam berbasis pluralitas sendiri harus diimplementasikan dalam jenjang pendidikan dasar sampai jenjang perguruan tinggi. Hal ini untuk menjawab tantangan keragaman yang secara empiris ada di Indonesia. Kesadaran anak didik terhadap realitas keragaman ini kemudian akan menjadi sebuah modal berharga dalam kehidupan bermasyarakat kita. Pengaruh-pengaruh aliran fundamentalis yang memang tidak dapat menerima konsep pluralitas menjadi sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat kita jikalau para anak didik kita tidak dibekali oleh *mindset* pluralitas atau melihat perbedaan sebagai sebuah keniscayaan.

Paradigma pendidikan pluralitas diharapkan mampu menghapus stereotip, sikap dan pandangan egoistik, individualistik, dan eksklusif di kalangan anak didik. Sebaliknya, dia senantiasa dikondisikan ke arah tumbuhnya pandangan yang mengakui bahwa keberadaan dirinya tidak bisa dipisahkan atau terintegrasi dengan lingkungan sekeliling yang realitasnya terdiri atas pluralitas etnis, ras, agama, dan budaya. Oleh karena itu, cukup proporsional jika proses pengenalan anak didik khususnya pada pendidikan Islam terhadap budaya, suku bangsa, dan masyarakat global. Pengenalan kebudayaan artinya anak dikenalkan dengan berbagai jenis tempat ibadah, lembaga kemasyarakatan, dan sekolah. Pengenalan suku bangsa artinya anak dilatih untuk bisa hidup sesuai kemampuannya dan berperan positif sebagai salah seorang warga dari masyarakatnya. Sementara lewat pengenalan

secara global diharapkan siswa memiliki sebuah pemahaman tentang bagaimana mereka bisa mengambil peran dalam percaturan kehidupan global yang akan dihadapi (<http://www.mushlihin.com>).

Sementara itu, pendidikan Islam yang selama ini identik dengan pendidikan agama paling tidak diharapkan akan mampu mengakumulasi nilai-nilai agama baik yang bersifat tekstual ataupun faktual. Selain itu, pendidikan agama semestinya diarahkan untuk mengajak orang menerima dan terbuka terhadap pluralisme. Dengan begitu kesempatan kepada para peserta pendidikan diberikan peluang untuk mencerna rasa keberagamaannya, dengan ciri khas dan bahasanya sendiri. Hal ini dilakukan dengan tujuan menumbuhkan kesadaran keberagaman di tengah komunitas di luarnya. Agar peserta pendidikan tidak dipaksa memahami. Peserta pendidikan dilatih untuk menggunakan kepekaan atas pluralitas dan memahaminya dengan bahasa batinnya sendiri.

Selain itu, dalam pendidikan pluralitas, murid dan guru terlebih dahulu memahami realitas atau sadar pada keadaan sekitarnya. Misalnya perlu adanya kesadaran tentang multi-kultural dan multi-religius di Indonesia. Langkah berikutnya adalah penanaman kesadaran bahwa sudah menjadi tugas manusia untuk menjunjung kemanusiaan dan mengembangkan nilai-nilai perenial agama. Kemudian mereka bersama-sama melakukan tindakan untuk mewujudkan aksi kemanusiaan. Langkah selanjutnya adalah evaluasi, yaitu kembali mengkaji teori untuk kemudian melakukan aksi yang lebih baik. Maka lingkaran kejadian-refleksi-aksi dan guru-murid-realitas, adalah sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan dalam dunia pendidikan.

Implementasi Pendidikan Pluralitas dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Aliyah

Salah satu bagian terpenting dari kurikulum adalah isi atau materi pembelajaran (*content*). Materi pembelajaran atau bahan ajar tidak lepas dari filsafat dan teori pendidikan yang dikembangkan. Hal ini berarti, materi kurikulum pendidikan agama Islam adalah materi yang harus dipelajari peserta didik sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam di antaranya, *pertama*, tercapainya manusia seutuhnya, manusia paripurna (*al-Insan al-Kamil*), karena Islam itu agama yang sempurna, sebagaimana dalam QS al-Mā'idah/5: 3.

Dalam kajiannya, materi pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan Islam meliputi empat aspek kajian, yaitu pertama, aspek kajian Alquran dan hadis, menekankan pada kemampuan teoritis baca tulis yang baik dan benar, memahami makna secara tekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, aspek kajian akidah dan akhlak, menekankan pada kemampuan memahami dan mempertahankan keyakinan atau keimanan yang benar serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai asma' al-husna. Selain itu, aspek ini juga menekankan pada pembiasaan untuk melaksanakan akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, aspek kajian Fikih (hukum Islam), menekankan pada kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang benar dan baik. Dan *keempat*, aspek kajian Tarikh (Sejarah Peradaban Islam), menekankan pada mengambil *'ibrah* (contoh atau hikmah) dari peristiwa-peristiwa bersejarah (Islam), meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan mengaitkannya dengan fenomena-fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebagainya, untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Meskipun masing-masing aspek tersebut dalam prakteknya saling mengaitkan atau terkait (mengisi dan melengkapi), tetapi jika dilihat secara teoritis masing-masing memiliki karakteristik tersendiri (Muhaimin, 2009: 33).

Pendidikan Islam pluralitas menghubungkan antara konsep pendidikan Islam dengan kemajemukan (plural). Inti pada toleransi, menghargai penganut agama, afinitas rasial, organisasi kemasyarakatan dan afiliasi parsial lainnya dengan menghilangkan kecurigaan dan kebencian satu sama lain, karena hal itu mengakibatkan ketidakharmonisan (Yunus, 2013: 9). Hal seperti inilah yang perlu dibudayakan dan dikembangkan dalam lembaga pendidikan Islam termasuk pada madrasah Aliyah.

Budaya toleransi dapat dibangun melalui pendidikan pluralitas dengan menanamkan beberapa kesadaran yang perlu ditawarkan sebagai bagian dari upaya membangun pendidikan pluralitas, seperti: kesadaran pluralitas agama, hidup berdampingan antar beda agama dapat diterima oleh semua kalangan elit agama (atau kalangan tertentu) meskipun hanya dalam keyakinannya masing-masing. Kesadaran nasionalisme untuk memahami bahwa Indonesia lahir bukan atas dasar satu agama tertentu. Kesadaran hak azasi manusia

(HAM), kesadaran inklusivisme menyadari bahwa semua agama mempunyai perbedaan namun juga memiliki persamaan, dan kesadaran sekularisme (Yunus, 2005: 4-10).

Dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam juga seharusnya mencakup budaya toleransi. Islam sebagai agama wahyu (agama samawi) yang mempunyai misi *Rahmatan li al-'alamīn*, mempunyai tingkat apresiasi (penghargaan) yang tinggi terhadap "tradisi" masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, hal itu sangat *ma'qūl* (logis), mengingat kedudukan Islam sebagai agama global, yang dakwahnya menyentuh masyarakat dunia tanpa kecuali, sekaligus sebagai agama akhir (penutup) yang membingkai kehidupan manusia sampai hari kiamat, dengan segala perkembangan kemajuan dan dinamika peradabannya, termasuk segala bentuk tradisi lokal dan nasional yang berkembang sepanjang waktu dan di semua tempat. Oleh karena itu, sikap Islam menghadapi masalah-masalah kehidupan manusia yang dinamis tersebut, hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang mendasar saja, yang dapat mengakomodasi perubahan dan perkembangan.

Pendidikan Islam tetap mengacu pada ajaran fundamental agama yang berupa tauhid. Pengikatan manusia kepada selain Allah swt. menurut Ashgar Ali Engineer adalah sebuah perampasan nilai otonomi yang telah dianugerahkan oleh-Nya, maka tidak salahlah kemudian kalau manusia dipandang sebagai agen bebas (Engineer, 1993: 1). Oleh karena itu, tauhid merupakan suatu konsep yang berisikan nilai-nilai fundamental yang harus dijadikan paradigma pendidikan Islam. Pendidikan dalam pandangan tauhid adalah pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai ilahiah (teologis), sebagai landasan etis dan normatif; dan nilai-nilai insaniah serta alamiah (kosmologis, antropo-sosiologis) sebagai nilai-nilai operasional.

Sedangkan dalam tataran di lapangan, aspek kajian pendidikan agama Islam menurut Hasbi al-Shidiqi meliputi: *pertama, tarbiyyah jismiyyah*, yaitu segala rupa pendidikan yang wujudnya menyuburkan dan menyehatkan tubuh serta menegakkannya, supaya dapat merintangai kesukaran yang dihadapi dalam pengalamannya. *Kedua, tarbiyyah 'aqliyyah*, yaitu sebagai pendidikan dan pelajaran yang akibatnya mencerdaskan akal dan menajamkan pikiran. *Ketiga, tarbiyyah adabiyyah*, yaitu segala macam praktek dan teori yang wujudnya meningkatkan budi dan perangai (Majid dan Dian Andayani, 2005: 138).

Berdasarkan kerangka tersebut, pendidikan Islam dalam kerangka tauhid ini harus melahirkan dua kemestian yang strategis, yaitu *pertama*, menjaga keharmonisan untuk meraih kehidupan yang abadi dalam hubungannya dengan Allah swt. *Kedua*, melestarikan dan mengembangkan terus-menerus nilai-nilai kehidupan sesuai kodratnya. Dengan kata lain, ditinjau dari perspektif teologis-filosofis, pendidikan Islam harus diarahkan kepada dua dimensi, yaitu dimensi ketundukan vertikal dan dimensi dialektik horizontal (Saefuddin, 1987: 125-126; dan Sauqi, 2008: 69).

Oleh karena itu, pentingnya pemahaman pluralitas, karena pluralitas umat atau rakyat dan ide-ide yang membentuk konteks esensial kehidupan modern. Pandangan global baru Islam kosmopolitan adalah pandangan yang mengakui perlunya reformasi substansial dari peradaban yang ada, kerangka institusional dan spiritual moral dan perbuatan manusia. Pandangan ini akan merespon hak-hak dasar universal; mengakui dan menghormati perbedaan dalam memilih mazhab, perbedaan budaya, teologi, dan agama; ideologi dan kultur lain, dan menyerap sisi terbaik yang ditawarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam kosmopolitan menghasilkan formulasi Islam yang lebih fleksibel yang pluralitas dan toleransinya lebih sesuai dengan realitas kehidupan modern di Indonesia (Voll, 2002: 267).

Paham pluralitas menjadi lebih penting di dalam menyikapi perbedaan yang memaksa membedakan orang karena pilihan-pilihan demokratisnya secara bebas tanpa tekanan. Dalam pendidikan pluralitas, sikap penghargaan akan keberagaman dan perbedaan sangat ditekankan. Dalam hal ini, keberagaman (pluralitas) dan perbedaan dipandang sebagai sunnatullah yang niscaya terjadi. Peserta didik harus ditanamkan sikap saling menghargai sedini mungkin untuk meminimalisir munculnya konflik dan pandangan subjektif terhadap keberagaman dan perbedaan di masa yang akan datang.

Dengan membangun paradigma pemahaman keberagaman (pluralitas) yang lebih humanis, pluralis, dan kontekstual diharapkan nilai-nilai universal yang ada dalam agama seperti kebenaran, keadilan, kemanusiaan, perdamaian dan kesejahteraan umat manusia dapat ditegakkan. Lebih khusus lagi, agar kerukunan dan kedamaian antar umat bergama dapat terbangun. Contoh kasus yang berkaitan dengan problematika keberagaman di sekolah atau madrasah dan bagaimana peran

guru/dosen dalam membangun pemahaman keberagaman yang inklusif pada siswa; Beberapa bulan setelah kasus pemboman dua buah kafe di kota A, seorang guru, setelah membaca berita di media massa, bercerita tentang kasus tersebut di depan murid-muridnya. Dia bercerita bahwa apa yang telah dilakukan oleh B dan kawan-kawan adalah bagian dari jihad. Dia menambahkan bahwa apa yang dilakukan B cs., menurut agama, tidak berdosa telah melakukan tindakan tersebut karena para korban adalah orang kafir yang beragama C yang sedang senang-senang di sebuah kafe.

Penjelasan guru atau dosen seperti ini, tentunya sangat menyedihkan bagi peserta didiknya. Guru dalam kisah tersebut, telah menumbuhkan sikap permusuhan terhadap pemeluk agama C, dan telah melegalkan tindakan kekerasan terhadap orang lain (umat beragama lain). Dalam hal ini, seharusnya guru menjelaskan bahwa tindakan B dan kawan-kawannya tidak bisa dibenarkan baik secara hukum maupun menurut agama. Dia juga harus menjelaskan bahwa semua agama atau kepercayaan yang ada di bumi ini, tidak pernah memerintahkan kepada pemeluknya untuk melakukan kekerasan terhadap siapa saja, termasuk pada pemeluk agama lain.

Mencermati gambaran peristiwa tersebut di atas, guru dan sekolah memegang peranan penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman yang inklusif di sekolah atau madrasah. Apabila guru mempunyai paradigma pemahaman keberagaman yang inklusif, maka dia juga akan mampu mengajarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman tersebut pada siswa di sekolah.

Peran guru dalam hal ini meliputi; *pertama*, seorang guru harus mampu bersikap demokratis, baik dalam sikap maupun perkataannya tidak diskriminatif. *Kedua*, guru seharusnya mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kejadian-kejadian tertentu yang ada hubungannya dengan agama. *Ketiga*, guru seharusnya menjelaskan bahwa inti dari ajaran agama adalah menciptakan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, maka pemboman, invasi militer, dan segala bentuk kekerasan adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. *Keempat*, guru harus mampu memberikan pemahaman tentang pentingnya dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keragaman budaya, etnis, dan agama (aliran).

Selain guru, sekolah atau madrasah juga memegang peranan penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang pluralis dan toleran. Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain; *pertama*, untuk membangun rasa saling pengertian sejak dini antara siswa-siswi yang mempunyai keyakinan berbeda, maka sekolah atau madrasah harus berperan aktif menggalakkan dialog antar iman dengan bimbingan guru-guru dalam sekolah atau madrasah tersebut. *Kedua*, penerapan pendidikan pluralitas dalam kurikulum dan buku-buku pelajaran yang dipakai dan diterapkan di sekolah atau madrasah.

Dalam rangka membangun keberagaman inklusif di madrasah, ada beberapa materi pendidikan agama Islam yang bisa dikembangkan dengan nuansa pluralitas, antara lain: *Pertama*, materi Alquran, dalam menentukan ayat-ayat pilihan, selain ayat-ayat tentang keimanan juga perlu ditambah dengan ayat-ayat yang dapat memberikan pemahaman dan penanaman sikap ketika berinteraksi dengan orang yang berlainan agama, aliran kepercayaan intra-agama, kebudayaan dan lain sebagainya, sehingga sedini mungkin sudah tertanam sikap toleran, inklusif pada peserta didik. Secara substansial, mata pelajaran Alquran-hadis memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk menggali nilai-nilai pluralitas dalam Alquran dan sikap Nabi Muhammad saw. yang diperankan dalam mensiasati perbedaan-perbedaan (afinitas rasial, aliran kepercayaan, strata sosial, dan perbedaan tingkat ilmu pengetahuan, ekonomi dan politik) di masyarakat Arab pada abad ketujuh yang terekam dalam Alquran dan hadis sebagai pegangan dan pedoman hidup untuk dikontekstualisasikan dengan kehidupan kekinian.

Kedua, materi fikih, bisa diperluas pada *muqaranah al-maahib* (perbandingan mazhab) dan *fiqh al-ikhtilaf* (fikih perbedaan). Hal itu dianggap penting, sebab mengetahui perbedaan pendapat ulama' merupakan salah satu ukuran dari kualitas pendalaman (*tafaquh*) fikih, sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh Qatadah dalam Ibn 'Abd al-Barr bahwa *man lam ya'rif al-ikhtilaf lam yasyumm ra'ih}ah al-fiqh bi anfihi* (Al-Barr, tth: 814) (barang siapa yang belum mengetahui perbedaan, berarti hidungnya belum mencium baunya ilmu fikih). Demikian juga, pernyataan dari Utsman bin Atho' yang mengatakan bahwa *la yanbagi li aadin an yuftiya al-nas, hatta yakuna 'aliman bi ikhtilaf al-'ulama* (Barr, tth: 816) (tidak diperkenankan

bagi seseorang untuk memberikan fatwa kepada masyarakat sampai ia mengetahui perbedaan ulama). Pengembangan juga perlu diarahkan pada *fiqh siyasah* (pemerintahan). Dari *fiqh siyasah* inilah terkandung konsep-konsep kebangsaan yang telah dicontohkan pada zaman Nabi saw. sahabat ataupun khalifah-khalifah sesudahnya. Pada masa kenabian misalnya, bagaimana Nabi Muhammad saw. mengelola dan memimpin masyarakat Madinah yang multi-etnis, multi-kultur, dan multi-agama. Keadaan masyarakat Madinah pada masa itu tidak jauh beda dengan masyarakat Indonesia, yang juga multi-etnis, multi-kultur, dan multi-agama.

Ketiga, materi akhlak yang menfokuskan kajiannya pada perilaku baik-buruk terhadap Allah swt., Rasul, sesama manusia, diri sendiri, serta lingkungan, penting artinya bagi peletakan dasar-dasar kebangsaan sebab kelanggengan suatu bangsa tergantung pada akhlak, bila suatu bangsa meremehkan akhlak, punahlah bangsa itu. Dalam Alquran telah diceritakan tentang kehancuran kaum Luth as. yang disebabkan runtuhnya sendi-sendi moral. Agar pendidikan agama bernuansa pluralitas ini bisa efektif, peran guru agama Islam memang sangat menentukan. Selain selalu mengembangkan metode mengajar yang variatif, tidak monoton, dan yang lebih penting, guru agama Islam juga perlu memberi keteladanan.

Secara substansial mata pelajaran Akidah-Akhlak di Madrasah Aliyah memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempelajari dan mempraktikkan akidahnya dalam bentuk pembiasaan untuk melakukan akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. *al-akhlak al-karimah* ini sangat penting untuk dipraktikkan dan dibiasakan oleh peserta didik dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan berbangsa, terutama dalam rangka mengantisipasi dampak negatif dari era globalisasi dan krisis multidimensional yang melanda bangsa dan Negara Indonesia.

Ruang lingkup mata pelajaran Akidah-Akhlak berwawasan pluralisme di Madrasah Aliyah meliputi aspek berikut ini:

a) Aspek akidah terdiri atas: prinsip-prinsip akidah dan metode peningkatannya, *al-asma'* *al-usna*, macam-macam tauhid seperti: *tau'īd ulūhiyyah*, *tau'īd rubūbiyyah*, *tau'īd al-sifat wa al-af'al*, *tau'īd rahmaniyyah*, *tau'īd mulkiyyah*, dan lain-lain, syirik dan implikasinya dalam kehidupan, pengertian dan fungsi ilmu kalam serta hubungannya dengan ilmu-ilmu lainnya,

dan aliran-aliran dalam ilmu kalam (klasik dan modern). Dalam rangka mewujudkan toleransi sebagai salah satu poin penting dalam pendidikan pluralitas, materi *al-asma' al-usna* dapat ditarik relevansinya dalam pergaulan sosial bahwa setiap wujud memiliki nama-nama Tuhan, sifat-sifat Tuhan, bahkan *af'al* Tuhan yang tidak terbatas yang patut dimuliakan. Olehnya itu, sikap meremehkan atau merendahkan yang lain merupakan sebuah sikap yang merendahkan nama-nama Tuhan yang sama sekali tidak terpuji. Ibn 'Arabi pernah mengatakan bahwa alam semesta ini merupakan panggung di mana Tuhan ingin menunjukkan manifestasi nama-nama, sifat-sifat, dan tindakan-tindakan-Nya.

b) Aspek akhlak terdiri atas: masalah akhlak yang meliputi pengertian akhlak, induk-induk akhlak terpuji dan tercela, metode peningkatan kualitas akhlak; macam-macam akhlak terpuji dan kaitannya dengan pendidikan pluralitas seperti *usnu al-zann*. Dalam pengertian ini, sikap mencurigai apalagi mencari-cari kesalahan orang lain tidak diperbolehkan dalam etika Islam. Kasih sayang dan cinta (*al-syafaqah* dan *al-maabbah*) merupakan akhlak terpuji bahwa semua umat manusia bersaudara. Tolong-menolong, toleran, persatuan dan kerukunan, pengenalan tentang ta saw.uf khususnya aplikasi dari sabda Nabi Muhammad saw. *Takhallaqu> bi akhlaq Allah* (berakhlaklah dengan akhlak Allah). Ruang lingkup akhlak tercela meliputi: *sū'u al-zann*, anarkisme, diskriminasi, fitnah, sombong, menganggap diri lebih baik dari yang lain.

Keempat, materi Sejarah Kebudayaan Islam, pendidikan agama Islam khususnya pada materi Sejarah Kebudayaan Islam, karena dalam materi Sejarah Kebudayaan Islam merupakan materi yang dapat dijadikan contoh untuk peserta didik dalam menyikapi suatu perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat sehingga sangat tepat apabila dalam materi tersebut ditarik relevansinya pada nilai-nilai pluralisme. Materi pendidikan Sejarah Kebudayaan Islam yang bersumber pada fakta dan realitas historis dapat dicontohkan praktik-praktik interaksi sosial yang diterapkan mulai dari masa kenabian yaitu ketika Nabi Muhammad saw. ketika membangun masyarakat Madinah. Dari sisi historis proses pembangunan Madinah yang dilakukan Nabi Muhammad saw. ditemukan fakta tentang pengakuan dan penghargaan atas nilai pluralitas dan toleransi. Agar pemahaman pluralitas dan

toleransi dapat tertanam dengan baik bagi peserta didik, maka perlu ditambahkan uraian tentang proses pembangunan masyarakat Madinah dalam materi “Keadaan Masyarakat Madinah Sesudah Hijrah”, dalam hal ini dapat ditelusuri dari “Piagam Madinah”. Sebagai salah satu produk sejarah umat Islam, Piagam Madinah merupakan bukti bahwa Nabi Muhammad saw. berhasil memberlakukan nilai-nilai keadilan, prinsip kesetaraan, penegakan hukum, jaminan kesejahteraan bagi semua warga serta perlindungan terhadap kelompok minoritas. Beberapa ahli tentang sejarah Islam menyebut Piagam Madinah sebagai loncatan sejarah yang luar biasa. Bila kita cermati, bunyi naskah konstitusi itu sangat menarik. Ia memuat pokok-pokok pikiran yang dari sudut tinjauan modern pun mengagumkan. Dalam konstitusi itulah pertama kalinya dirumuskan ide-ide yang kini menjadi pandangan hidup modern di dunia, seperti kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan hubungan ekonomi antar golongan, dan lain-lain.

Dalam materi ini, nilai-nilai pluralisme pada setiap dinasti yang berkuasa dipaparkan kepada peserta didik untuk menanamkan pentingnya bersikap toleransi dengan harapan dapat menciptakan suasana yang harmonis. Misalnya, sejarah atau proses masuknya Islam di Andalusia dengan menerangkan bahwa khalifah-khalifah dinasti bani Umayyah di Spanyol sangat toleran terhadap multikulturalisme dan perbedaan agama, mazhab, aliran teologis dan budaya. Dalam perbedaan agama, mereka sering mengadakan kerjasama dengan para raja yang beragama Kristen di perbatasan untuk saling menjaga perdamaian kedua belah pihak dari serangan musuh.

Menurut Nurcholish Madjid, toleransi merupakan persoalan ajaran dan kewajiban melaksanakan ajaran itu. Jika toleransi menghasilkan adanya tata cara pergaulan yang “enak” antara berbagai kelompok yang berbeda-beda, maka hasil itu harus dipahami sebagai “hikmah” atau “manfaat” dari pelaksanaan suatu ajaran yang benar. Hikmah atau manfaat itu adalah sekunder nilainya, sedangkan yang primer adalah ajaran yang benar itu sendiri. Sebagai sesuatu yang primer, toleransi harus dilaksanakan dan diwujudkan dalam masyarakat, sekalipun untuk kelompok tertentu -untuk diri sendiri- pelaksanaan toleransi secara konsekuen itu mungkin tidak menghasilkan sesuatu yang “enak”. Materi-materi yang bersumber pada pesan agama dan fakta yang terjadi di lingkungan sebagaimana

diuraikan di atas merupakan kisi-kisi minimal dalam rangka memberikan pemahaman terhadap keragaman umat manusia dan untuk memunculkan sikap positif dalam berinteraksi dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Dalam proses pendidikan, materi itu disesuaikan dengan tingkatan dan jenjang pendidikan. Maksudnya, sumber bacaan dan bahasa yang digunakan disesuaikan dengan tingkat intelektual peserta didik di masing-masing tingkat pendidikan. Untuk tingkat pendidikan lanjutan, materi dipilih dengan menyajikan fakta-fakta historis dan pesan-pesan Alquran yang lebih konkrit serta memberikan perbandingan dan perenungan atas realitas yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat dewasa ini.

PENUTUP

Eksistensi pendidikan pluralitas dalam kurikulum Pendidikan Islam pada Madrasah Aliyah mendapat momentum untuk diterapkan, sudah saatnya disosialisasikan, dan diaplikasikan dalam dunia pendidikan. Namun materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Indonesia pada Madrasah Aliyah yang diterapkan selama ini masih kurang dirasakan kontribusinya dalam menghargai pendidikan pluralitas, demokratisasi dan humanisme. Sebab, ajaran agama yang ditekankan dalam pendidikan lebih bersifat teologis-dogmatis dan fanatisme sektarian sehingga membentuk rasa kebenaran hanya pada agamanya, afinitas rasial, kebudayaan, institusi keagamaan, dan aliran pemikiran teologi dan mazhab hukumnya sendiri.

Pendidikan agama Islam lebih berorientasi kepada pembentukan peserta didik yang saleh, taat beribadah, dan gemar beramal untuk tujuan kehidupan akhirat tanpa memperhatikan dampak sosial kemanusiaan yang dilahirkan dari ibadah-ibadah yang dijalankan. Budaya toleransi sangat perlu ditanamkan melalui pendidikan pluralitas dengan semangat pluralisme, nasionalisme, inklusivisme, sekulerisme, dan penegakan HAM. Karena dengan semangat tersebut, setiap penganut agama akan berpikir substansial dan universal, tidak secara parsial. Hal ini penting untuk mencari titik temu dalam sistem kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama. Dalam rangka pengembangan pendidikan pluralitas dan sikap keberagaman inklusif pada madrasah Aliyah, maka beberapa materi pendidikan agama Islam yang dapat dikembangkan pada materi pelajaran Alquran dan Hadis, fikih, Akidah-Akhlak, dan pada materi pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan ini melalui proses telaah dan bimbingan oleh Prof. Dr. H. Mappanganro, M.A., Prof. Dr. H. Moh. Qasim Mathar, M.A. dan Dr. H. Kamaluddin Abu Nawas, M.Ag, penulis mengucapkan terima kasih. Selain itu banyak pihak yang telah terlibat sehingga tulisan ini dapat hadir di tengah-tengah pembaca. Terima kasih pula kepada pengelola jurnal *Al-Qalam* yang telah memuat tulisan ini dan aktif menyampaikan artikel untuk direvisi, semoga artikel yang disajikan dapat bermanfaat bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Barr, Ibn 'Abd. tth. *Jāmi' al-Bayān al-'ilmi wa Fa ā'ilihī*. Juz 2.
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor. 1992. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu Sosial*, terj. Arief Furchan. Surabaya: Usaha Nasional.
- Engineer, Ashgar Ali. 1993. *Islam dan Pembebasan*. Yogyakarta: LKIS.
- Fanani, Ahmad Fuad. 2004. *Islam Mazhab Kritis: Menggagas keberagaman Liberatif*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- <https://sharingkuliahku.wordpress.com/IMPLEMENTASI-multikulturalisme-dalam-dunia-pendidikan/diakses/2011/09/14/>
- <https://www.scribd.com/doc/108831695/Makalah-Keragaman-Budaya-Dan-Agama-Multikultural, diakses pada tanggal 2/4/2015>.
- Ihsan, Fuad. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Majid, Abdul dan Dian Andayani. 2005. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*. Bandung: Rosda Karya.
- Mastuhu. 1999. *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Muhaimin. 2009. *Rekonstruksi Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Naim, Ngainum dan Achmad Sauqi. 2008. *Pendidikan Multikultural-Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruz.
- Nata, Abuddin. 1997. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Nazir, Muhammad. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Saefuddin, A.M. 1987. *Desekularisasi Pemikiran: Landasan Islamisasi*. Bandung: Mizan.
- Salim, Haitami. "Menggagas Pendidikan Agama Lintas Sekolah Bercirikan Agama Siswa yang Tidak Seagama" dalam *Jurnal-Analis*, Vol. XII, No. 2, Desember 2012.
- Suardi, Moh. 2015. *Ideologi Politik Pendidikan Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tilaar, H. A. R. 1997. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Era Globalisasi*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Voll, John L. Esposito-John O. 2002. "Makes of Contemporary Islam" diterjemahkan oleh Sugeng Hariyanto, dkk., dengan judul *Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yunus, Abd. Rahim. 2005. "Pendidikan Toleransi dalam Konteks Indonesia" dalam *Jurnal Mitra: Media Komunikasi antar PTAIS*, Vol. 2 No. 2/2005.
- . 2013. "Membangun Budaya Toleransi Di Tengah Pluralitas Agama di Indonesia", dalam *Jurnal Rihlah*. Vol. 1 Nomor 1/2013.